

ABSTRAK

Kenny Pangalila (00000009181)

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MELAKUKAN AKUISISI SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA DARI PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

(v + 115 halaman)

Akuisisi saham perusahaan telah menjadi masalah bisnis dan hukum di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir ini. Pelaku usaha berupaya mengembangkan perusahaannya dengan melakukan akuisisi perusahaan-perusahaan yang telah ada, dan sistem pengendalian beralih pada perusahaan pengakuisisi. Tujuan akuisisi untuk memupuk kekuatan dalam finansial juga membentuk suatu sistem manajemen perusahaan terakuisisi. Akuisisi sebagai aksi korporasi perusahaan dituntut untuk memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas atau pemegang saham independen, dan pengaturan akuisisi saham yang harus ditaati pelaku usaha yang berguna untuk melindungi kepentingan pelaku usaha itu sendiri.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai tata cara pembelian kembali saham oleh perusahaan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2013 belum dapat sepenuhnya menjamin perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dan ketentuan mengenai tata cara konsultasi untuk pelaku usaha dalam rencana akuisisi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 dan diatur lebih detail dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. Tahun 2010 belum dapat sepenuhnya menjamin perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang melakukan akuisisi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Akuisisi Saham, Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Referensi : 53 (1994-2014)

ABSTRACT

Kenny Pangalila (00000009181)

(V+115 pages)

THE LEGAL PROTECTION OF SHARE ACQUISITION OF THE PUBLIC COMPANY FROM THE PERSPECTIVE OF COMPETITION LAW

Acquisition of shares the company aimed at fostering financial strength in establishing a management system. Acquisition should consider the interests of minority shareholders. Business actors should also be protected in the acquisition. Law Number 5 of 1999 which was letter refined by Government Regulation, first, the method for supervising post notification, and second, the benefits of consultation for business actors.

The relevant data were collected and analyzed based on the approach of legislation and it can be concluded that the procedures for repurchase of shares by the company set out in the Financial Services Authority Regulation No. 2/ POJK.04 /2013 is not adequate and effective appropriate to provide protection for minority shareholders and the procedures for consulting for businesses actors in the acquisition plan stipulated Government Regulation No. 57 Year 2010 and regulated in more detail in the Business Competition Supervisory Commission Regulation No. The year 2010 is not adequate and effective appropriate to provide protection for businesses actors.

Keyword: The legal protection, of share acquisition, from the perspective of competition law

Reference: 53 (1994-20114)